



PENGADILAN
NEGERI KUNINGAN

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kng

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARMIN**
Tempat lahir : Kuningan
Umur, tanggal lahir : 52 Tahun / 4 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 Rt.001, Rw.001, Desa Jalaksana,
Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H. : Hakim
M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekira Pukul 10.46 WIB, di CV. Yamina Indah Lestari alamat Jl. Raya Jalaksana No.039 Rt.018/Rw.004 Jalaksana Kuningan, telah terjadi aktifitas pembuatan boneka yang dimana karyawan di CV. Yamina Indah Lestari tersebut yang berjumlah 270 Karyawan, yang pada hari ini Karyawan tersebut masuk kerja sebanyak 270 Karyawan dan pihak dari Penanggung Jawab CV. Yamina

Hal 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Lestari tidak menerapkan WFH, yang berkerja wajib masuk 50 % saja dan di Tempat Kerja tersebut tidak terdapat pengukur suhu tubuh yang mengecek karyawan masuk kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21.i (1) dan (2) huruf F dan D Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat perkara pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat perkara pidana tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu saksi **DIAN KASMIN**, dan saksi **JIMMY MORA FIRDAUS**, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **DIAN KASMIN**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Penanggung Jawab tempat usaha CV. Yamina Indah Lestari yang beralamat di Jl. Raya Jalaksana No.039 Rt.018/Rw.004 Jalaksana Kuningan;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan tanggal 6 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, kami melakukan patroli dalam melaksanakan tugas di Jalan Raya Jalaksana dan kami menemukan salah satu Perusahaan Pabrik Boneka CV. Yamina Indah Lestari adanya kerumunan karyawan sekitar kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) orang dan disaat kami melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sebagai Penanggung Jawab usaha tidak menyediakan sarana dan prasarana pengukur suhu tubuh untuk karyawan dan tidak menerapkan protokol kesehatan WFH karyawan 50 %, sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Hal 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira Pukul 10.46 WIB, di CV. Yamina Indah Lestari alamat Jl. Raya Jalaksana No.039 Rt.018/Rw.004 Jalaksana Kuningan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar Pukul 10.46 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyediakan tidak menyediakan sarana dan prasarana pengukur suhu tubuh untuk karyawan dan tidak menerapkan protokol kesehatan WFH karyawan 50 %;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **JIMMY MORA FIRDAUS**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Penanggung Jawab tempat usaha CV. Yamina Indah Lestari yang beralamat di Jl. Raya Jalaksana No.039 Rt.018/Rw.004 Jalaksana Kuningan;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan tanggal 6 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, kami melakukan patroli dalam melaksanakan tugas di Jalan Raya Jalaksana dan kami menemukan salah satu Perusahaan Pabrik Boneka CV. Yamina Indah Lestari adanya kerumunan karyawan sekitar kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) orang dan disaat kami melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sebagai Penanggung Jawab usaha tidak menyediakan sarana dan prasarana pengukur suhu tubuh untuk karyawan dan tidak menerapkan protokol kesehatan WFH karyawan 50 %, sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira Pukul 10.46 WIB, di CV. Yamina Indah Lestari alamat Jl. Raya Jalaksana No.039 Rt.018/Rw.004 Jalaksana Kuningan;

Hal 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar Pukul 10.46 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasarana pengukur suhu tubuh untuk karyawan dan tidak menerapkan protokol kesehatan WFH karyawan 50 %;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Di persidangan Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan bukti beupa :

- Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.46 WIB, Jl. Raya Jalaksana No.39 Rt.018/Rw.004 Jalaksana Kuningan;
- Bahwa, terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasarana pengukur suhu tubuh untuk karyawan dan tidak menerapkan protokol kesehatan WFH karyawan 50 %;
- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubatan tersebut lagi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SARMIN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.46 WIB, di Jl. Raya Jalaksana No.039 Rt.018/Rw.004 Jalaksana Kuningan;
- Bahwa, terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasarana pengukur suhu tubuh untuk karyawan dan tidak menerapkan protokol kesehatan WFH karyawan 50 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain : Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai

Hal 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - dokumen photo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 8 Juli 2021 oleh NANANG ADI WIJAYA S.H.,M,H, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan dihadiri Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H..M.H.

Hal 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kng